

# **PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DI SEKTOR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI SULAWESI UTARA**

**Septiana M. M. Sanggelorang, Vekie A. Rimate, dan Hanly F.DJ. Siwu**

*Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Ekonomi Pembangunan  
Universitas Sam Ratulangi Manado  
email : [septianasanggalorang@gmail.com](mailto:septianasanggalorang@gmail.com)*

## **ABSTRAK**

Pembangunan manusia merupakan salah satu indikator bagi kemajuan suatu negara. Indeks Pembangunan Manusia sangat tergantung pada komitmen pemerintah sebagai penyedia sarana penunjang. Pendidikan memainkan peran utama dalam membentuk kemampuan sebuah negara berkembang untuk menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan, kesehatan merupakan prasyarat bagi peningkatan produktivitas, sementara keberhasilan pendidikan juga bertumpu pada kesehatan yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah daerah pada bidang pendidikan dan kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara dan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara. Model analisis yang digunakan adalah berganda, dengan menggunakan SPSS versi 21. Hasil regresi menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan berpengaruh positif, yaitu meningkat sebesar 0,870 dan secara statistik signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Dan variabel pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan berpengaruh negatif, yaitu sebesar -0,438 dan secara statistik tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Sulawesi Utara.

***Kata Kunci: Pendidikan, Kesehatan, Indeks Pembangunan Manusia.***

## A. PENDAHULUAN

Pembangunan adalah suatu proses perubahan menuju ke arah yang lebih baik dan terus menerus untuk mencapai tujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Pembangunan harus diarahkan sedemikian rupa sehingga setiap tahap semakin mendekati tujuan. Pembangunan harus dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan sesuai prioritas dan kebutuhan masing-masing daerah dengan akar dan sasaran pembangunan nasional yang telah ditetapkan melalui pembangunan jangka panjang dan jangka pendek.

Posisi manusia selalu menjadi tema sentral dalam setiap program pencapaian pembangunan. Pembangunan Manusia merupakan salah satu indikator bagi kemajuan suatu negara. Suatu negara di katakan maju bukan saja dihitung dari pendapatan domestik bruto saja tetapi juga mencakup aspek harapan hidup serta pendidikan masyarakatnya. Dengan peningkatan kemampuan, kreatifitas dan produktifitas manusia akan meningkat sehingga mereka menjadi agen pertumbuhan yang efektif. Upaya membuat pengukuran pencapaian pembangunan manusia yang telah dilakukan suatu wilayah harus dapat memberikan gambaran tentang dampak dari pembangunan manusia bagi penduduk sekaligus dapat memberikan gambaran tentang persentase terhadap pencapaian secara ideal.

Pada tiga tahun terakhir yaitu pada tahun 2010-2012, IPM di Provinsi Sulawesi Utara peningkatan pada masing-masing tahun tidak dapat menembus angka 0,6%. Pada tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar 0,54%, tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar 0,59% dan pada tahun 2012 kembali ke angka 0,54%.

IPM merupakan suatu indeks komposit yang mencakup tiga bidang pembangunan manusia yang dianggap sangat mendasar yang dilihat dari kualitas fisik dan non fisik penduduk. Adapun tiga indikator tersebut, yaitu: 1) Indikator kesehatan, 2) Tingkat pendidikan, dan 3) Indikator ekonomi.

Pendidikan dan Kesehatan merupakan tujuan pembangunan yang mendasar di suatu wilayah. Menurut Meier dan Rauch (dalam Aloysius Gunadi Brata, 2002, Hal. 4) pendidikan, atau lebih luas lagi adalah modal manusia, dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan. Hal ini karena pendidikan pada dasarnya adalah bentuk dari tabungan, menyebabkan akumulasi modal manusia dan pertumbuhan output agregat jika modal manusia merupakan input dalam fungsi produksi agregat. Kesehatan merupakan inti dari kesejahteraan, dan pendidikan adalah hal yang pokok untuk mencapai kehidupan yang layak.

Konsep Indeks Pembangunan Manusia

IPM mencakup tiga komponen yang dianggap mendasar bagi manusia dan secara operasional mudah dihitung untuk menghasilkan suatu ukuran yang merefleksikan upaya pembangunan manusia. Ketiga komponen tersebut adalah: 1) Peluang hidup (longevity), 2) Pengetahuan (knowledge), 3) Hidup layak (living standard). Peluang hidup dihitung berdasarkan angka harapan hidup ketika lahir, pengetahuan diukur berdasarkan rata-rata lama sekolah dan angka

melek huruf penduduk berusia 15 tahun ke atas, dan hidup layak diukur dengan pengeluaran per kapita yang didasarkan pada paritas daya beli (Purchasing Power Parity).

### **Teori Pengeluaran Pemerintah**

#### Teori Wagner

Teori ini menekankan pada perkembangan persentase pengeluaran pemerintah yang semakin besar terhadap GNP. Menurutnya apabila dalam suatu perekonomian pendapatan per kapita meningkat, secara relatif pengeluaran pemerintah akan ikut meningkat, terutama karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan dan sebagainya.

#### Teori Peacock dan Wiseman

Teori ini memandang bahwa pemerintah selalu berusaha untuk memperbesar pengeluaran sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar, sehingga teori Peacock dan Wiseman merupakan dasar dari pemungutan suara.

#### Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Pendidikan

Menurut Michael P. Todaro (2000) ada dua biaya pendidikan, yaitu; biaya-biaya pendidikan individual dan biaya-biaya pendidikan tidak langsung. Biaya pendidikan langsung individual ini yang kemudian berkenaan langsung pada pendapatan per kapita masyarakat. Biaya pendidikan langsung individual adalah segenap biaya moneter atau uang yang harus dipikul oleh siswa dan keluarganya untuk membiayai pendidikan.

#### Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Kesehatan

Undang-undang di Indonesia yang mengatur mengenai anggaran kesehatan adalah UU No 36 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa besar anggaran kesehatan pemerintah pusat dialokasikan minimal 5 persen dari APBN di luar gaji, sementara besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi dan Kabupaten/Kota dialokasikan minimal 10 persen dari APBD di luar gaji.

Maria Johanna (2001), dalam penelitian mengenai analisis pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan terhadap pengentasan kemiskinan melalui peningkatan pembangunan manusia di Provinsi Jawa Tengah. Diperoleh kesimpulan bahwa pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan akan dapat mempengaruhi kemiskinan jika pengeluaran tersebut dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas pembangunan manusia.

Tri, Maryani (2012) diperoleh kesimpulan bahwa pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, pengeluaran pemerintah sektor kesehatan, dan jumlah penduduk miskin berpengaruh positif terhadap IPM. Meskipun berpengaruh positif pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan masih berpengaruh kecil terhadap terhadap IPM hal ini menandakan bahwa pengeluaran untuk sektor tersebut belum optimal baik dari penggunaannya dan alokasinya.

Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah daerah pada sektor pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia diuji oleh Astir Meylina (2012). Hasil perhitungan disimpulkan bahwa secara parsial variabel pengeluaran pemerintah daerah pada sektor pendidikan berpengaruh pada IPM.

Badrudin, Rudy (2011) disimpulkan bahwa 1) variabel pengeluaran pemerintah di Provinsi DIY pada sektor pendidikan berpengaruh tidak signifikan terhadap pembangunan manusia di Provinsi DIY baik dengan pengamatan waktu menggunakan time log 2 dan 3 tahun; 2) variabel pengeluaran pemerintah di Provinsi DIY pada sektor kesehatan berpengaruh tidak signifikan terhadap pembangunan manusia di Provinsi DIY baik dengan pengamatan waktu menggunakan time log 2 dan 3 tahun; 3) variabel pengeluaran pemerintah di Provinsi DIY pada sektor infrastruktur berpengaruh tidak signifikan terhadap pembangunan manusia baik dengan pengamatan waktu menggunakan time log 2 dan 3 tahun.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dirancang sebagai penelitian eksplanasi untuk menjelaskan tentang pengaruh pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan dan kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Utara dengan mengambil data pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan dan kesehatan, beserta data Indeks Pembangunan Manusia pada seluruh kabupaten di provinsi Sulawesi Utara di Badan Pusat Statistik. Waktu penelitian bulan Mei-Juli 2014. Model analisis yang digunakan adalah Analisis regresi berganda, dengan menggunakan program komputer SPSS versi 21.

Multikolinearitas berarti terdapat hubungan linier yang sempurna di antara beberapa atau semua variabel bebas pada model regresi. Dampak yang ditimbulkan adalah koefisien regresi menjadi tidak dapat ditaksir dan nilai *standard error* setiap parameter menjadi tak terhingga.

Suatu model dikatakan baik apabila memenuhi asumsi homoskedastisitas (tidak terjadi heteroskedastisitas) atau memiliki ragam konstan. Terjadinya heteroskedastisitas dapat menyebabkan tidak tercapainya sifat BLUE (*Best Linear Unbiased Estimated*).

Autokorelasi didefinisikan sebagai korelasi antara anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu dan ruang. Gejala autokorelasi besar kemungkinan terjadi pada observasi yang menggunakan data *time series* karena data yang terdapat pada suatu periode dipengaruhi oleh data yang terjadi pada periode sebelumnya

*Adjusted R-Squared* merupakan koefisien determinasi yang sudah disesuaikan terhadap jumlah variabel bebas dalam model. Untuk mengetahui keragaman antar variabel dapat dilakukan uji keragaman yang mengikuti persamaan :

$$A_2 = \frac{1 - (1 - R^2)n - 1}{n - k}$$

Nilai keragaman yang tinggi (mendekati 100%) menunjukkan model semakin baik dalam menjelaskan variabel tak bebas.

Uji-F digunakan untuk menguji kelayakan model dan menguji parameter regresi secara keseluruhan. Hipotesis yang diuji adalah :

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \dots = 0$$

$$H_1 : \beta_1 \neq 0$$

Jika seluruh nilai sebenarnya dari parameter regresi sama dengan nol maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang linier antara variabel tak bebas dengan variabel-variabel bebas. Atau dapat dilihat juga pada *p-value* model tersebut dibandingkan dengan taraf nyata. Jika kurang dari  $\alpha$  maka tolak  $H_0$ , yang berarti terdapat hubungan linier antara variabel tak bebas dengan variabel-variabel bebas.

Uji-t digunakan untuk menguji parameter secara parsial. Dengan uji-t akan dilihat apakah setiap variabel independen (X) berpengaruh secara signifikan (nyata) terhadap variabel dependen (Y).

Hipotesis yang diuji adalah :

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \dots = 0$$

$$H_1 : \beta_1 \neq 0$$

Untuk uji-t ini dapat dilihat melalui *p-value* dari masing-masing variabel bebas. Jika *p-value* lebih kecil dari taraf nyata yang digunakan maka dapat disimpulkan bahwa variabel bebas tersebut berpengaruh secara signifikan (nyata) terhadap variabel tak bebas, begitupun sebaliknya.

### C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji normalitas data dapat dilihat dengan menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov test. Hasilnya adalah sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Uji Normalitas Data**  
**(One Sample Kolmogorov-Smirnov Test)**

Indikator		IPM	Dinas Pendidikan	Dinas Kesehatan
N		11	11	11
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	3,4189	8,0929	7,4119
	Std. Deviation	,52966	,56193	,38123

Most Extreme Differences	Absolute	,350	,268	,205
	Positive	,304	,167	,205
	Negative	-,350	-,268	-,203
Kolmogorov-Smirnov Z		1,161	,887	,678
Asymp. Sig. (2-tailed)		,135	,411	,747

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber :Pengelohan data 2014

Berdasarkan uji normalitas data dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov diperoleh nilai Asymp. Sig. (2-tailed) masing-masing variabel X1 0,411, X2 0,747, Y 0,135. Yang lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan data terdistribusi normal.

**Tabel. 2**  
**Hasil Uji Multikolinieritas**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)	-	-
Dinas Pendidikan	,845	1,183
Dinas Kesehatan	,845	1,183

a. Dependent Variable: IPM **Coefficients<sup>a</sup>**

Sumber Data : pengelohan data 2014

Dilihat dari tabel Coefficients nilai VIF pada Output menunjukkan keberadaan *multikolinieritas*.

Bila VIF < 10,00 maka tidak terjadi gejala Multikolerasi

Bila VIF > 10,00 maka terjadi gejala Multikolerasi

Dengan Hasil :

Nilai Tolerance : X1 Dinas Pendidikan = 0,845

: X2 Dinas Kesehatan = 0,845

Nilai VIF : X1 Dinas Pendidikan = 1.183

: X2 Dinas Kesehatan = 1.183

Dari diagram di atas tersebut terlihat bahwa penyebaran residual tidak teratur. Hal tersebut terlihat pada plot yang terpancar dan tidak membentuk pola tertentu. Dengan hasil demikian, kesimpulan yang biasa diambil adalah bahwa tidak terjadi gejala homokedastisitas atau persamaan regresi memenuhi asumsi heterokedastisitas.

**Tabel 3**  
**Uji Autokorelasi Data**

Model	Change Statistics		Durbin-Watson
	df2	Sig. F Change	
1	8 <sup>a</sup>	,015	1,898

a. Predictors: (Constant), Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan

b. Dependent Variable: IPM

*Sumber Data : pengelohan data 2014*

Pada analisis regresi terlihat bahwa nilai DW 1.898 dan nilai DL 0.367, dan DU 2,286 .DL < DW < DU yakni 0.367 DL, 1.898 DW, 2.286 DU. Berada pada antara DL dan DU dan berada pada titik keragu-raguan. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat gejala autokorelasi yang lemah.

**Tabel 4**  
**Kontribusi dan Korelasi Variabel Bebas Terhadap Variabel Terikat**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics	
					R Square Change	F Change
1	,806 <sup>a</sup>	,649	,561	,35088	,649	7,393

a. Predictors: (Constant), Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan

b. Dependent Variable: IPM

*Sumber Data : pengelohan data 2014*

Dalam melihat pengaruh Variabel Independen Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan secara gabungan terhadap variabel Dependen IPM dapat dilihat pada Tabel Model Summary di atas, pada nilai R square. Besarnya R square (R<sup>2</sup>) pada tabel dibawah ini adalah 0,949. Angka tersebut mempunyai makna besarnya pengaruh Variabel Independen Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan secara gabungan terhadap variabel Dependen IPM secara gabungan. Dalam menghitung Koefisien Determinasi (KD) dapat diketahui dengan rumus :

$$KD = R^2 \times 100\%$$

$$KD = 0,649 \times 100\%$$

$$KD = 64,9\%$$

Besarnya pengaruh Variabel Independen Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan secara gabungan terhadap variabel Dependen IPM secara gabungan adalah 64,9%.

Dan pengaruh diluar model dapat dihitung dengan :

$$e = 1 - R^2$$

$$e = 1 - 0,649$$

$$e = 0,351 \times 100\%$$

$$e = 35,1\%$$

Yang berarti 35,1% berarti besarnya faktor lain yang mempengaruhi diluar model yang diteliti. Artinya besarnya pengaruh variabel Independen Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan secara gabungan terhadap variabel Dependen IPM adalah sebesar 64,9%, sedangkan pengaruh sebesar 35,1% disebabkan oleh variabel di luar model yang diteliti.

**Tabel 5**

**Pengaruh variabel independen Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan Secara Parsial Terhadap Variabel Dependen Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1,294	2,308		,560	,591
Dinas Pendidikan	,820	,215	,870	3,818	,005
Dinas Kesehatan	-,609	,317	<b>-,438</b>	<b>-1,923</b>	<b>,091</b>

a. Dependent Variable: IPM

*Sumber Data : pengolahan data 2014*

Menentukan besarnya taraf Signifikan sebesar 0,05 dan Degree of Freedom  $DF = n - (K+1)$  atau  $DF = 11 - (2+1) = 8$ . Dari ketentuan tersebut diperoleh t tabel sebesar 1,859 (untuk uji dua arah)

Dalam perhitungan SPSS yang tertera pada tabel Coefficients di atas di mana tabel t adalah untuk menunjukan bahwa adanya Pengaruh Linear Variabel Independen Dinas Pendidikan dan Variabel Dependen IPM ialah 3,818.

Hasil dari perhitungan dengan SPSS menunjukan angka t hitung sebesar  $3,818 > t$  tabel sebesar 1,859. Dengan demikian keputusannya ialah  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Artinya ada

Pengaruh Linear Variabel Independen Dinas Pendidikan dan Variabel Dependen IPM. Maka Variabel Independen Dinas Pendidikan berpengaruh terhadap Variabel Dependen IPM.

Besarnya pengaruh Variabel Independen Dinas Pendidikan terhadap Variabel Dependen IPM diketahui dari nilai Koefisien Beta (dalam kolom Standardized Coefficients Beta) ialah 3,818 Signifikan karena nilai signifikansi/probabilitas hasil yang tertera pada kolom Sig  $0,00 < 0,005$ .

Hasil dari perhitungan dengan SPSS menunjukkan angka t hitung sebesar  $-1,923 < t$  tabel sebesar 1,859. Dengan demikian keputusannya ialah  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak. Artinya tidak ada pengaruh linier antara Variabel Dinas Kesehatan terhadap Variabel Dependen IPM. Maka Variabel Independen Dinas Kesehatan tidak berpengaruh terhadap Variabel Dependen IPM.

Besarnya pengaruh Variabel Independen Dinas Kesehatan terhadap Variabel Dependen IPM diketahui dari nilai Koefisien Beta (dalam kolom Standardized Coefficients Beta) ialah -1,923 pengaruh sebesar ini Signifikan karena nilai signifikansi / probabilitas hasil yang tertera pada kolom Sig  $0,91 > 0,05$ .

**Tabel 5**  
**Kelayakan Model Regresi**

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	1,820	2	,910	7,393	,015 <sup>b</sup>
Residual	,985	8	,123		
Total	2,805	10			

a. Dependent Variable: IPM

b. Predictors: Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan

Sumber Data : pengolahan data 2014

Menghitung nilai F tabel dengan ketentuan besar nilai taraf Signifikansi sebesar 0,05 dan Nilai Degree Of Freedom dengan ketentuan Numerator / Vektor 1: Jumlah Variabel – 1 atau  $3 - 1 = 2$ , dan dumerator / Vektor 2 : jumlah kasus-jumlah variabel atau  $11 - 3 = 8$ . Dengan ketentuan tersebut diperoleh angka F tabel sebesar 5,317.

Hasil perhitungan dengan SPSS didapatkan angka F hitung sebesar  $7.393 > F$  tabel sebesar 5,317. Dengan demikian  $H_0$  ditolak, dan  $H_1$  diterima. Artinya ada hubungan linier antara Variabel Independen Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan dengan Variabel Dependen IPM. Dengan nilai Sig 0,015 Kesimpulan adalah model regresi di atas sudah layak dan benar.

## D. PENUTUP

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil analisis menunjukkan bahwa Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Karena pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mengalokasikan dana yang besar setiap tahunnya di Sektor Pendidikan, sehingga Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Utara selalu mengalami peningkatan.
2. Hasil analisis menunjukkan bahwa Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Kesehatan tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Karena besarnya Pengeluaran Pemerintah di Sektor Kesehatan yang ada di Provinsi Sulawesi Utara ternyata masih belum mampu membantu pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia yang ada di Sulawesi Utara, hal ini dikarenakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah membangun beberapa sarana kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas di beberapa tahun belakangan ini sehingga banyak memakan anggaran.

### Saran

1. Untuk Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara diharapkan mampu meningkatkan sektor Pendidikan di tahun yang akan datang.
2. Pemerintah juga disarankan lebih memperhatikan sektor Kesehatan, karena jumlah orang yang sakit di Provinsi Sulawesi Utara masih sangat tinggi.
3. Dalam penelitian selanjutnya, perlu adanya penambahan variabel makro ekonomi lain yang kemungkinan mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia agar model estimasi dapat lebih dipercaya dan mampu menjelaskan Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Utara. Selain itu disarankan juga untuk memperbanyak sensus yang digunakan agar hasilnya lebih representatif terhadap populasi yang dipilih, dan mengambil sampel selain di Sulawesi Utara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amanda, Rica. 2010. Analisis Efisiensi Teknis Bidang Pendidikan Dalam Implementasi Model Kota Layak Anak (Studi Kasus 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008). Universitas Negeri Surabaya. Skripsi tidak diterbitkan.
- Astri, Meylina. 2012. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah pada Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Bisnis*. Vol.1. No. 1 Tahun 2012. ISSN: 2302-2663.

- Badrudin, Rudy. 2011. Pengaruh Pendapatan dan Belanja Daerah terhadap Pembangunan manusia di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi Pembangunan*. ISSN: 1410-2293. Volume 9, Nomor 1, April 2011: 23-30.
- BPS. 2007. “*The Economics of Democracy: Financing Human Development in Indonesia*”.
- Danti, Christiana U dan Dra. Hj. Hemiwati RH, MS. Analisis Pengaruh Tingkat Kemiskinan dan Pengeluaran Pemerintah di Sektor Publik Terhadap Pembangunan Manusia di Jawa Tengah 2007-2009. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*.
- Dr. Santoso, P.B, MS, & Ashari. 2005. Analisis Statistik dengan Microsoft Excel & SPSS. Andi Yogyakarta.
- Galih, (2012). Analisis Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Angka Melek Huruf Perempuan Dan Angka Partisipasi Sekolah Perempuan Di Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Skripsi S1, Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Tahun 2012.
- Hasbullah. 2006. *Otonomi Pendidikan*. Jakarta: PT.Grafindo
- K, Johana Maria. 2011. Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Pengetasan Kemiskinan Melalui Peningkatan Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*. Volume 1, No. 1. Hal 25-41.
- Mangkoesebroto Guritno (2012), *Ekonomi Publik Edisi ke – 3*, Fakultas Ekonomi UGM Yogyakarta
- Maryani, Tri. 2012. “Analisis Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Jawa Tengah”. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*.
- Simatupang, Pantjar dan Saktyanu K. 2003. Perencanaan dan pembangunan ekonomi
- Sahrah, Alimartus. 2007. *Memberdayakan Sumber Daya Manusia Untuk Meningkatkan Kualitas Bangsa*. Pidato Dies Natalis Unmawa ke XXI, Yogyakarta.
- Sasana, Hadi. 2009. “Peran Desentralisasi Fiskal Terhadap Kinerja Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah”. *Jurnal Terakreditasi. Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Vol. 10. No.1, Juni 2009:103-124.
- Sunyoto Danang (2013), *Analisis Data Ekonomi Dengan Menggunakan SPSS*, PT Indeks Jakarta.
- Todaro Michael P dan Smith Stephen C (2006), *Pembangunan Ekonomi Edisi ke – 9*, Penerbit Erlangga.
- United Nations Development Programme (UNDP). 1990. *Global Human Development Report*. Human Resources Department.
- [www.mandikdasmen.depdiknas.go.id](http://www.mandikdasmen.depdiknas.go.id)
- Sumber: <http://infosulawesiutara.blogspot.com/2010/02/profil-sulawesi-utara>